

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang penelitian dalam penulisan karya ilmiah sebuah konsep dan teori sangat diperlukan karena akan dijadikan landasan atau panduan sebagai petunjuk untuk mengedepankan dan memahami permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Konsep dan teori juga digunakan agar tidak ada kesalah pahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat dari konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang akan digunakan dalam penulisan ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian dan Penulis | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1 | Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditulis Oleh : Mujarot (2018) Sumber; https://www.oneresearch.id/ | Hasil dari penelitian pegawai dalam prestasi kerja sudah baik, ketepatan pegawai juga dikatakan sudah baik, peran atasan dalam memberikan arahan organisasi juga sudah baik. Untuk itu kinerja pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemuda dan olahraga di Kepulauan Meranti sudah dikatakan baik dengan hasil yang positif mengenai tugas yang | Kinerja pegawai dinilai melalui prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, dan kepemimpinan yang dilakukan oleh atasan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dilaksanakan oleh pegawai dan atasannya. | |
| 2 | <p>Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Menjaga Eksistensi Nilai Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara</p> <p>Ditulis Oleh : Fridolin Wisoro Balida (2018)</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.neliti.com/id/publications/</p> | <p>Dalam meningkatkan kinerja dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat, ahli budaya, tokoh adat dan pemerintah agar kebudayaan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara semakin maju dan dinilai baik. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan Halmahera Utara harus lebih giat melakukan pertemuan atau rapat bersama masyarakat lokal agar semua program mengenai kegiatan pariwisata dapat terlaksana dengan baik dengan bantuan masyarakat didalamnya.</p> | <p>Penilaian kinerja berdasarkan indikator produktifitas, responsibilitas, responsivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas.</p> |
| 3 | <p>Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan Daerah.</p> <p>Ditulis Oleh : Muhammad Khotim (2019)</p> <p>Sumber:</p> | <p>Dalam penilaian kinerja tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada rencana strategis, visi, misi, pada saat melaksanakan program kegiatannya masih tidak sesuai dengan tujuan yang</p> | <p>Menilai kinerja dan menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi rencana visi misi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan daerah di Kabupaten Lamongan.</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | http://etd.repository.ugm.ac.id/ | <p>ditetapkan. Faktornya adalah anggaran yang terbatas jumlahnya, dan pemerintah yang tidak mengutamakan kegiatan pariwisata sangat membantu perekonomian masih banyak program yang pelaksanaanya tidak sesuai jika dibandingkan dengan program di tahun-tahun sebelumnya.</p> | |
| 4 | <p>Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>Ditulis Oleh : Susan Santoso (2020)</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.neliti.com/id/publications/</p> | <p>Rencana Strategis di Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan akuntabilitas kinerja sudah sesuai dan berhasil pelaksanaan program-programnya.</p> <p>Pelaksanaannya berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik dalam penyelenggaraan pariwisata di Sulawesi Utara.</p> | <p>Melakukan penilaian akan pencapaian visi misi apakah sudah sesuai dengan tujuan dan programnya dan dilihat melalui LAKIP.</p> |
| 5 | Analisis Perkembangan wisata alam di Bukit Resort Taman | Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa potensi disekitar Resort | Meneliti pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>Nasional Bukit Barisan Selatan.</p> <p>Ditulis Oleh : Meizannur Wulandari (2020)</p> <p>Sumber:</p> <p>https://jurnal.fp.unila.ac.id/</p> | <p>Balik Bukit terdapat air terjun, ekosistem hutan pegunungan, Sungai way sepa. Masyarakat sekitar juga memiliki potensi usaha yang dimiliki yaitu dalam pembuatan kerajinan tangan yang akan mendukung kegiatan pariwisata di taman Nasional Bukit barisan Selatan.</p> | <p>dalam hal kerajinan tangan yang akan menunjang kegiatan sektor pariwisata.</p> |
| 6 | <p>Analisis Kinerja Bidang Pelestarian Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan Pariwisata Kota Surakarta.</p> <p>Ditulis Oleh : Nur Fadhilathul (2020)</p> <p>Sumber:</p> <p>http://download.garuda.ristekdikti.go.id/</p> | <p>Dalam kegiatan pengembangan pariwisata yang paling berpengaruh adalah dalam hal kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan. Permasalahan yang dialami adalah terbatasnya sumber daya dalam organisasi dan pada teknologi informasi. Untuk itu diperlukan evaluasi peningkatan sumber daya organisasi yang akan berpengaruh pada proses pemanfaatan teknologi informasi yang baik dan sesuai.</p> | <p>Menganalisis kinerja pariwisata dalam bidang promosi dan kerjasama pariwisata.</p> |

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Publik tidak hanya terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah tetapi juga dengan institusi lain yang terkait dengan upaya memenuhi kepentingan publik seperti organisasi non pemerintahan, militer, kelompok kepentingan, partai politik, media massa dan masyarakat sipil lainnya. Demikian fokusnya tidak lagi sekedar mengimplementasikan kebijakan pemerintah, tetapi mencakup pembuatan (formulasi) kebijakan negara, pelaksanaan kebijakan dan penataan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (Syafri, 2012:18).

Kedudukan administrasi publik dalam pemerintahan yang baik hanya terpaku pada aturan legalistik yang kaku, tetapi juga berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan legal tersebut. Sebagian besar persoalan administrasi publik bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi Publik adalah suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dinamis, oleh karena itu Gerald Caiden (Thoha, 2014 : 40) menandaskan bahwa disiplin administrasi publik ini pada hakikatnya merupakan suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (public affairs) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (public business).

Denhardt dan (Rahayu dan Juwono, 2019 : 24) menyebutkan bahwa dalam administrasi publik, pencarian masyarakat tercermin dalam pandangan bahwa peran pemerintah khususnya pemerintah daerah memang untuk membantu menciptakan dan mendukung masyarakat. Pemerintah juga mengakomodasi peran masyarakat dengan membangun koneksi antara warga Negara dengan

komunitasnya dalam pemerintahan yang demokratis. Disamping itu administrasi publik harus meninggalkan pendekatan pencapaian efisiensi mekanis dimana manusia diperlakukan seperti halnya mesin produksi.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah rangkaian proses Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengedepankan pada demokratisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pencapaian tujuan negara.

2.2.2. Konsep Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi. (Yeremias T. Keban 2004 : 191).

Menurut Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004 : 192) mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 175) sebagai gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan tersebut, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193) juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Kinerja berasal dari job performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

2.2.3. Kinerja Organisasi

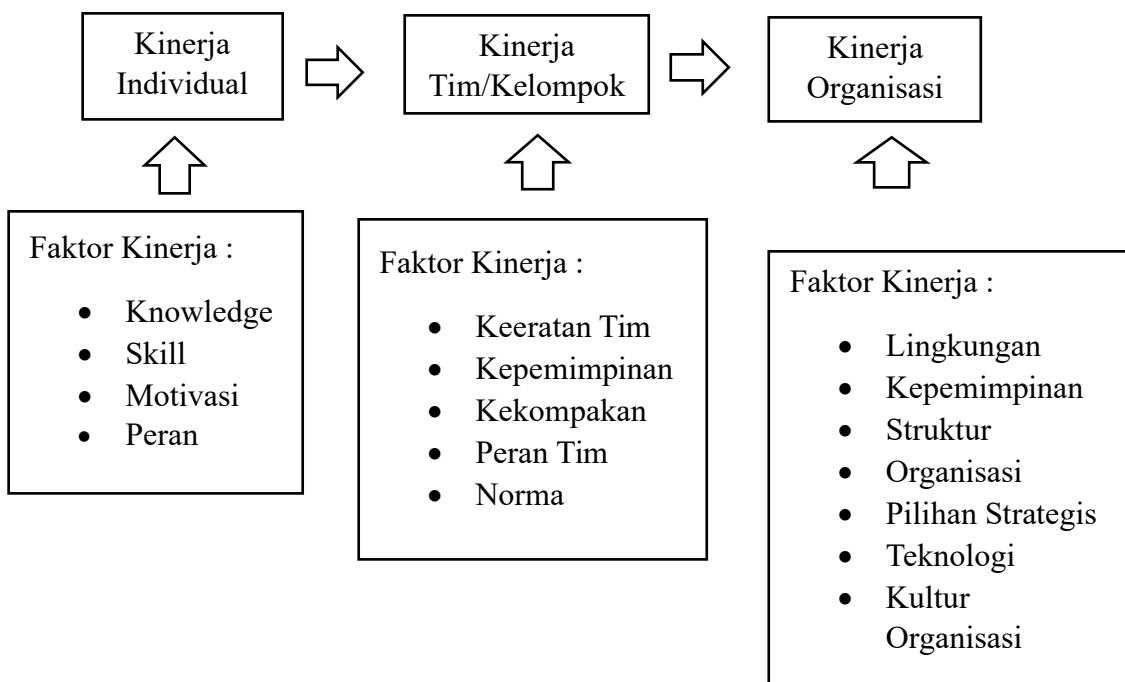
Menurut Swanson (dalam Keban, 2004:193) Kinerja organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya.

Di dalam buku budaya kinerja organisasi, Masana Sembiring (2012:81), Mahsum (2009:25) mengatakan Kinerja adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Kemudian organization performance di dalam buku Manajemen Kinerja, Wibowo (2007:2) diartikan sebagai kinerja organisasi. Menurut Amstrong dan Baron (1998:15) Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses berlangsung. Di dalam kinerja, pekerja memainkan peran kunci atas keberhasilan organisasi seberapa baik seorang pemimpin mengelola kinerja bawahan akan secara langsung mempengaruhi kinerja individu, unit kerja, dan seluruh organisasi.

Kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya membutuhkan peran pegawai didalamnya untuk melaksanakan kegiatan organisasi tersebut. Sumber daya yang berperan diantaranya adalah manusia dan yang lainnya berupa informasi, teknologi, peraturan yang dibuat. Konsep kinerja organisasi dilihat bahwa sebuah organisasi tentunya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan pelayanan yang baik maka dapat dinilai bahwa kinerja organisasi sudah tercapai sesuai dengan tujuannya. Dalam melakukan pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan sehingga dapat dilihat dan dinilai apakah kinerja organisasi yang dinilai sudah terbukti baik atau masih terdapat kekurangan yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk perbaikan kedepannya serta dapat dibandingkan untuk pengukuran kinerja tahun-tahun sebelumnya agar kedepannya kinerja organisasi tersebut dapat meningkatkan dan memberi dampak positif bagi orgnisasi yang berjalan.

Gambar 2.1 Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok terhadap Kinerja Organisasi



2.2.4. Indikator Kinerja

Menurut Sudarmanto yang mengutip dari Dwiyanto terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

1. Produktivitas, yang dapat dinilai efektif atau tidaknya sebuah organisasi, apakah anggaran yang digunakan sudah efisien dan bagaimana pelayanan yang diberikan.
2. Kualitas Layanan, dinilai dengan mensurvei apakah masyarakat sebagai penerima layanan sudah puas atau belum dengan pelayanan yang diberikan dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

3. Responsivitas, dinilai dengan melihat apakah organisasi merespon cepat kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang diberikan sudah sesuai atau belum dengan program yang dibuat.
4. Responsibilitas, dinilai dengan sesuai atau tidaknya kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan peraturan yang sudah dibuat.
5. Akuntabilitas menurut Hotman, Silo, dan Poli (2022:89) adalah sebagai standar dan prosedur yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh kepegawaian dikantor dinas pariwisata kabupaten Jayapura untuk memberikan kemudahan dan juga mengedepankan kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan dan prosedur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator pengukuran kinerja organisasi dari Agus Dwiyanto yang menyatakan bahwa didalam kinerja organisasi sebuah instansi publik mencakup lima aspek penilaian yaitu : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

2.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Agus Dwiyanto (2002:83) dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. Sarana

Sarana merupakan fasilitas yang harus disediakan dalam kegiatan pelayanan. Dengan adanya sarana yang lengkap maka akan mempermudah proses pelayanan yang dilakukan dan akan berdampak pada pencapaian pelayanan yang telah dibuat dan direncanakan sebelumnya.

Sarana atau fasilitas yang dilihat dari sisi kegunaannya menurut Moenir (2000:120) adalah peralatan kerja, kelengkapan kerja, perlengkapan bantu atau fasilitas.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam organisasi karena organisasi yang dibuat akan dijalankan oleh manusia agar pencapaian tujuannya bisa terlaksana dengan baik. Sumber daya manusia dalam organisasi berfungsi untuk merencanakan tujuan organisasi dan sebagai pelaksana agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

2.2.6. Penilaian Kinerja

Menurut Larry D. Stout (2015) mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (missionaccomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus, memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi, memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati, memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya, memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektifitas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati menjadikannya alat komunikasi antara

bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi, mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

Begini pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu. Menurut Dwiyanto (2016) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas.

Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki stakeholder yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lainnya menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan yang jelas akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda. (Hassel, 2015 : 183).

2.2.7. Kepariwisataan

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki Kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula (Suswantoro 2014 : 3).

Selanjutnya Pariwisata menurut Suswantoro (2014 : 3) adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, agama, Kesehatan maupun kepentingan lainnya seperti ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga pesyaratan yang diperlukan, yaitu :

- a. Harus bersifat sementara
- b. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Berikut ini adalah beberapa definisi Pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa pakar :

- a. Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam waktu yang pendek ketempat tujuan diluar tempat tinggal sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada ditempat tujuan tersebut, ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan harian atau darmawisata (Nyoman S Pendit, 2015 : 30).
- b. Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah, serta masyarakat. Tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta pengunjung lainnya (Robert Mc Intosh dan Shashinkant Gupta 2017 : 8).

c. Pariwisata adalah suatu proses kepergian seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya, dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi sosial, kebudayaan, politik, agama, Kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Gamal Suwantoro, SH 2017 : 3).

Dalam Undang-undang Kepariwisataan Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum fasilitas pariwisata aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Jadi dapat disimpulkan pariwisata adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan, memelihara atau membangun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap ciptaan Tuhan, manusia, tata hidup, seni budaya dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi atau dinikmati oleh wisatawan.

2.2.8. Pengertian dan Tujuan Dinas Pariwisata

Menurut Amalia (2017 : 4), Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas sebagai pembantu. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata ialah sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Pariwisata sebagaimana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pariwisata sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Kabupaten.
4. Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan teknis dibidang pariwisata
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Amalia (2017 : 5), adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan
2. Melestarikan, membina, dan mengembangkan peninggalan Sejarah dan purbakala, nilai-nilai budaya, seni dan perfilman
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang kepariwisataan
4. Mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan yang berbasis masyarakat
5. Menggali potensi lokal untuk pengembangan destinasi wisata
6. Meningkatkan Kerjasama antara bidang kebudayaan dan pariwisata antar Pelaku, antar sektoral, dan antar wilayah

7. Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya
8. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di bidang Kepariwisataan'

2.2.9. Pengembangan Pariwisata

Menurut Suswantoro (2014 : 19) unsur pokok yang mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:

a. Objek wisata dan daya tarik wisata

Merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pengusaha objek wisata daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya

3. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus

b. Prasarana wisata

Merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata.

c. Sarana wisata

Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

d. Tata laksana/infrastruktur

Merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas dan di bawah permukaan tanah.

e. Masyarakat/lingkungan

Terdiri dari masyarakat lingkungan budaya. Produksi wisata mempunyai beberapa komponen, yaitu :

1. Atraksi daerah tujuan wisata
2. Fasilitas yang tersedia

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata berarti masyarakat mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga masalah-masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata nasional sehingga turut membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan pariwisata (Suswantoro 2014 : 3).

Menurut Suswantoro (2014 : 56) saptu kebijaksanaan pengembangan pariwisata adalah :

- a. Promosi merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus dilaksanakan secara terpadu baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena menyangkut pengembangan lintas sektor.
- c. Kawasan pariwisata'
- d. Wisata Bahari
- e. Produk wisata merupakan upaya untuk dapat menampilkan produk yang lebih bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing tinggi.
- f. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dalam pengembangan pariwisata yang harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk memberi jasa pelayanan pariwisata.
- g. Kemampuan nasional dan wisata.

2.2.10. Pengertian Wisatawan

Wisatawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia pariwisata. Wisatawan sangat beragam, tua-muda, miskin-kaya, asing- nusantara, semuanya mempunyai keinginan dan juga harapan yang berbeda. Jika ditinjau dari arti kata “wisatawan” yang berasal dari kata “wisata” maka sebenarnya tidaklah tetap sebagai pengganti kata “tourist” dalam bahasa inggris. Kata itu berasal dari bahasa Sansekerta “wisata” yang berarti “perjalanan” yang sama atau dapat disamakan dengan kata “travel” dalam bahasa inggris. Jadi orang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka wisatawan sama artinya dengan kata “traveler” karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman memakai akhiran “wan” untuk menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, keadaanya, jabatannya dan kedudukan seseorang. Adapun pengertian wisatawan antara lain: Menurut Kustini (2015) Wisatawan memiliki arti yaitu seseorang atau sekelompok yang mengunjungi suatu tempat dengan sifat sementara atau tidak permanen.

Menurut WTO (2009), membagi wisatawan kedalam tiga bagian yaitu:

1. Pengunjung adalah setiap orang yang berhubungan ke suatu Negara lain dimana ia mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Negara yang dikunjunginya.
2. Wisatawan adalah setiap orang bertempat tinggal di suatu Negara tanpa memandang kewarganegaraannya, berkunjung kesuatu tempat pada Negara yang sama untuk waktu lebih dari 24jam.
3. Darmawisata atau excursionist adalah pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24jam di Negara yang dikunjungi, termasuk orang yang berkeliling dengan kapal pesiar.

Sedangkan menurut Marpaung (2002, hal 36) wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu Negara tanpa memandang kewarganegaraanya, berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk jangka waktu lebih dari 24 jam yang tujuan perjalannya dapat diklasifikasikan dengan tujuan memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi, liburan, Kesehatan, Pendidikan, keagamaan, dan olahraga, ataupun untuk keperluan bisnis dan mengunjungi keluarga. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan wisatawan adalah orang yang mengunjungi tempat lain dan meninggalkan tempat asalnya untuk tujuan tertentu.

2.2.11. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Menurut Sinarta (2010 : 26) sarana Pariwisata adalah segi kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya yaitu terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan.

Prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sehingga memudahkan para wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa sarana kepariwisataan di bagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Sarana pokok kepariwisataan adalah sarana yang berfungsi untuk memberikan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan.

2. Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas rekreasi yang fungsinya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dan membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal di suatu daerah tujuan wisata yang dikunjunginya.
3. Sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap, berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal di suatu daerah tujuan wisata, tetapi juga membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan uang di tempat yang dikunjunginya.

Dan kelompok prasarana dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Prasarana umum yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak (umum) bagi perekonomiannya dan termasuk didalamnya adalah sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur lalu lintas, sistem pembuangan limbah, sistem telekomunikasi.
2. Kebutuhan pola hidup modern misalnya rumah sakit, apotek, pusat-pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan dan pom bensin.
3. Prasarana Wisata meliputi tempat penginapan, tempat informasi wisatawan, kantor informasi dan promosi dikenal dengan tourist information center (TIC), tempat-tempat rekreasi dan sport, sarana transportasi penunjang.

2.3. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pikir merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

